

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jalan pengakuan adalah jalan yang panjang. Jalan panjang ini searah dengan perjuangan pengakuan yang tidak pernah berakhir. Dalam kutipan Felix Baghi, Ricoeur berkata, “perjuangan pengakuan tetap tinggal tanpa batas akhir”.¹ Perjuangan ini juga melewati dialektika antara pengakuan dan salah pengakuan atau pengabaian. Berawal dari proses identifikasi sesuatu dengan jalan membuat distingsi-distingsi yang jelas, subjek mengklaim diri sebagai pusat makna dari kebenaran pengetahuan. Ia lalu bergerak menuju proses pengakuan akan identitas diri dengan segala bentuk kesanggupannya untuk berbicara, bertindak, berceritera dan menjaga komitmen diri sebagai subjek moral yang bertanggung jawab. Kemudian ia sampai pada tahap di mana subjek membuka diri dan ikhlas untuk mengakui yang lain secara mutual dalam tindakan etis yang resiprokal.

Jalan panjang pengakuan seperti ini tidak ditempuh dengan mulus tanpa halangan. Pengakuan secara inheren mengandung di dalam dirinya apa yang disebut *salah pengakuan*. Ini terjadi khususnya ketika di dalam pengakuan itu, orang melupakan atau sama sekali tidak mengindahkan aspek asimetris dan heteronom karena hanya menekankan nilai mutual dan relasi yang resiprokal dengan yang lain. Pada titik ini kita perlu memperhitungkan aspek etis penerimaan terhadap setiap kehadiran yang lain sebagai pemberian. Karena

¹ *Ibid.*, hal. 188

sebagai pemberian, yang lain dengan segala keberlainannya adalah suatu berkat yang bisa juga mendatangkan rahmat. Terhadap hal seperti ini, kita patut menerima yang lain dengan sikap *gratitude*, penuh rasa syukur dan berterima kasih, karena semuanya adalah berkat kebaikan kasih.

Persoalan-persoalan mutakhir yang muncul dalam bingkai praktek politik di Indonesia semakin menunjukkan ketidakberesan yang sulit untuk dibiarkan. Gejala persolan ini semakin mengancam berbagai macam pihak, mulai dari orang perseorangan, kelompok maupun institusi-institusi tertentu, khususnya rakyat kecil yang berhadapan dengan ketimpangan politik di Indonesia pada era reformasi ini.

Bertolak pada konsep etika pengakuan dalam suatu tatanan politik yang digagaskan oleh Paul Ricoeur penulis bahwa wajah politik Indonesia tidak lagi menunjukkan diri sebagai sesuatu yang mulia yakni bertujuan untuk mencegah dan memecahkan konflik kepentingan dalam masyarakat dan berfungsi memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi telah berubah wajah menjadi penindas, sarana untuk melegitimasi kejahatan, sebagai permainan dan bisnis serta menjadi tameng pembenaran diri oleh para kaum elit politik dan pemangku kekuasaan. Arti politik yang semulanya suci, kini menunjukkan wajah yang kian seram menakutkan dan penuh dengan lumpur dosa. Ketimpangan politik ini menjadi tugas berat yang patut dibaharui oleh berbagai pihak di masa mendatang.

5.2 Catatan Kritis

Gebrakan besar pemikiran Paul Ricoeur tentang etika pengakuan mutual ini sebagai etika politik yang merupakan konsep normatif dan persuasif yang begitu urgen dalam sebuah pemikiran tentang politik itu sendiri. Ricoeur menjelaskan bahwa etika politik dapat dilihat dalam dua garis pemikiran ini. *Pertama*, ia berkenan dengan konstitusi diri yang dialogal. Dalam konteks konstitusi diri yang dialogal digambarkan dalam dialektika antara identitas ipse dan yang lain. *Kedua*, secara vertikal, ia berkenan dengan konstitusi hierarkis dari predikat-predikat yang mengkualifikasi tindakan dan perbuatan manusia yang ditilik sebagai obligasi atau kewajiban dari sudut pandang moral.

Keagungan konsep pemikiran Paul Ricoeur tidak pernah dapat mengarsir fakta bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan ketaksempurnaan manusia dalam segala hal adalah sesuatu yang mutlak. Begitu pula yang penulis temukan dalam diri Paul Ricoeur khususnya dalam kaitan dengan pemikirannya tentang pengakuan mutual dan etika politik. Untuk itu pandangan Paul Ricoeur tersebut juga terbuka pada kritik demi membangun sebuah keseimbangan dalam diskursus tentang filsafat politik itu sendiri.

Dalam pemikiran tentang perjuangan untuk diakui dalam pengakuan mutualnya, Paul Ricoeur benar-benar mengedepankan aspek kemanusiaan manusia. Ia menjelaskan keterkaitan antara etika dan yuridiksi yang perlu bagi peranan hati nurani. Ia memulainya dari poin legalitas yang dirunut kembali kepada moralitas dan dari situ mendapat rujukannya pada hati nurani. Ada tiga ciri menonjol dalam legalitas. *Pertama*, larangan yang tampak sebagai sisi negatif hukum. Ricoeur di sini menyebut 10 Perintah Allah yang jelas bernada negatif,

seperti jangan membunuh, jangan mencuri (korupsi). Ricoeur sendiri melihat nada negatif ini sebagai berdimensi represif.

Kedua, adanya klaim universalitas yang dilihat sebagai prinsip validitas. Misalnya, larangan membunuh akan kehilangan sifat normatifnya jika perintah tersebut tidak diterapkan ke semua orang, di semua kondisi, tanpa kecuali. Tetapi, bagaimana dengan kekecualian dalam keadaan-keadaan khusus? Jika ada pengecualian, itu justru berarti adanya penghormatan terhadap universalitas aturan. Dengan kata lain, harus terdapat aturan yang membenarkan pengecualian itu, yang memiliki bobot legitimasi yang sama dengan aturan dasar (universalitas hukum). *Ketiga*, pluralitas manusia dalam kaitannya dengan norma atau aturan. Apa yang secara universal menjadi perintah dan larangan, dalam keadaan tertentu justru memperlihatkan kerapuhannya. Relasi diri dan orang lain merupakan relasi protagonis kewajiban. Karena itu, bersama dengan Kant, Ricoeur memisahkan *apa yang menjadi milikmu* dan *apa yang menjadi milikku* dengan tujuan membatasi kebebasan manusia individual. Gagasan jarak keadilan (*just distance*) ditemukan lagi di sini. Dengan pemahaman demikian, cita-cita dari perjuangan untuk diakui dalam pengakuan mutual dapat menjadi sumbangsi positif bagi sistem politik di Indonesia secara khusus dalam masa reformasi ini.

5.3 Relevansi

Pertama, melalui pemikirannya tentang etika politik, Paul Ricoeur secara fundamental memberikan suatu sumbangan etika, pro-kehidupan. Bahwa penghargaan terhadap hak hidup setiap manusia dalam segala hal merupakan tindakan moral paling tepat yang harus diambil setiap orang dalam kehidupan bersama orang lain.

Kedua, dalam konteks sistem politik di Indonesia (era reformasi) yang ditandai dengan berbagai fenomena praktek politik yang menyimpang, kita disadarkan untuk peduli terhadap ketidakberesan stadium akhir praktek politik khususnya di Indonesia. Karena praktek politik yang menyimpang berpotensi mengancam stabilitas sebuah negara. Oleh karena itu, pandangan Paul Ricoeur tentang pengakuan mutual yang adalah wujud etika politik ini, merupakan sebuah solusi besar bagi oknum-oknum yang terlibat dalam segala urusan mengenai praktek politik, khususnya bagi kaum elit politik/politikus dan para pemangku kekuasaan agar mengedepankan aspek moral yakni bersumber dari hati nurani dalam menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat.

Ketiga, di kalangan kaum akademisi. Di tengah dominannya perkembangan pengetahuan dalam bidang politik yang lebih merujuk pada kesalahan pengakuan dan keambrukan dalam prakteknya oleh para elit politik dan pemangku kekuasaan yang semakin kompleks, penulis mengharapkan kiranya, pandangan Paul Ricoeur tentang etika pengakuan mutual sebagai etika politik memberikan kontribusi bagi segenap akademisi yang sedang bergelut di dunia politik maupun sebaliknya.

Keempat, dalam konteks masyarakat luas. Di satu sisi Pandangan Paul Ricoeur membangunkan kembali kesadaran masyarakat tentang banyak ketimpangan yang semakin mengerikan dalam fakta praktek sistem politik di Indonesia, pada masa reformasi. Di sisi lain menyadarkan masyarakat untuk kembali menghidupi tugas pengawasannya dan menagih janji aspirasi mereka, sebagai wujud dari konsep perjuangan untuk diakui bahwa mereka punya aspirasi dan punya utang pada orang-orang (politikus/penguasa) yang sering salah mengakui masyarakat sebagai yang lemah dan tertindas.

DAFTAR PUSTAKA

I. SUMBER PRIMER

Ricoeur, Paul. *Life in Ques of Narrative, On Paul Ricoeur Narrative and Interpretation*, dalam David Wood (Penerj.), London: Routledge, 1991

_____. *The Course Of Recognition*, dalam David Pellauer (Penerj.), Cambridge, MA: Havard University Press, 2005

Baghi, Felix. *ALTERITAS, Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)*, Paul Budi Kleden (epilog), Maumere: Ledalero, 2012

II. SUMBER SEKUNDER

Andrianus, Pito Toni, Efriza, Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik, Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019

Badrun, Ubedilah. *Sistem Politik Indonesia, Kritik Dan Solusi Sistem Politik Efektif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019

_____. *Radikalisasi Gerakan Mahasiswa: Studi Kasus HMI MPO*, Jakarta: Media Raushanfkr, 2006

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000

Baghi, Felix. *Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik*, Maumere: Ledalero, 2009

Bakker, Anton, dan Charris Zubair, Ahmad. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Beddy, Iriawan Maksudy. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II Prancis*, Jakarta: PT Gramedia

- Jakarta, 1985
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2007
- Darmawan, Ikhsan. *Analisis Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Diamond, Larry. *Developing democracy: Toward Consolidation*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999
- Hatta, Mohammad. *“Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*, dalam J. C. A. Gaskin (Penerj.), Oxford: Oxford University Press, 1996
- Honneth, Axel. *The Struggle for Recognition: The Moral of Grammar Social Conflict*, dalam Joel Anderson (Penerj.), Cambridge, MA: The MIT Press, 1996
- Imam, Hidajat. *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara press, 2009
- Jegalus, Norbertus. *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, Jakarta: Obor, 2011
- _____. *Filsafat Nusantara (Manuskrip)*, Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA, 2018
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar cet. ke-10*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Maarif, Syafii. *Islam Dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988

- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik, Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, Mikhael Dua (prolog), dan Gabriel Lele (epilog), Maumere: Ledalero, 2013
- _____. *Post-Sekularisme, Toleransi Dan Demokrasi*, Maumere: Ledalero, 2017
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1989
- _____. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987
- _____. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- M.S, Kaelan. *Filsafat Bahasa, Hakikat Dan Realitas Bahasa*, Yogyakarta: Paradigma, 2017
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Raho, Bernard. *Sosiologi*, Maumere: Ledalero, 2016
- Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo 1992
- Rohman, Abd., Hardianto Tri, Willy. *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance*, Malang: Intrans Publishing, 2019
- Taylor, Charles. *Dilemmas and Connections, Selected Essays*, Cambridge, Masschusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011. *Modern Social Imaginaries*, Durham and London: Duke University Press, 2004. *The Politics of Recognition in Multiculturalism: the Politics of Recognition*, Anny Gutmann (Penerj.), New York: Cambridge University Press, 1994
- Saefullah, Eep Fatah. *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar*

- Demokratisasi Pasca Orde Baru***, Bandung: Mizan, 2000
- Saku, Dominikus. ***Filsafat Etika, (Manuskrip)***, Kupang: Fakultas Filsafat, UNWIRA, 2010
- Seta, Basri. ***Pengantar Ilmu Politik***, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011
- Strathern, Paul. ***Hegel in 90 minutes***, Chicago: North Halsted Street, 1997, dalam Frans Kowa (Penerj.), ***90 Menit Bersama Hegel***, Deswanto Marboen (Editor), Jakarta: Erlangga, 2001
- Strong, C.F. ***Modern Political Konstitutions: An Introduction To The Comparative Study Of Their History And Existin Form***, London; The English Book Society and Sidgwick & Jakson limited, 1966 Sri Widowatie, (Penerj.), ***Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk***, Bandung: Nusa Media, 2015
- Sumaryono, E. ***Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat***, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Wazler, Michael. ***The Concept of Civil Society in Michael Wazler, Toward a Global Civil Society***, Povidence Berghahn Books, 1995
- Winarno, Budi. ***Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*** Yogyakarta: Media Pressindo, 2008
- Yamin, Muhammad. ***Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia)***

III. SUMBER INTERNET

<https://www.google.com/search?q=karya+ricoeur&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b/> didownload, hari/tanggal: Minggu, 17/11/2019.

Pukul: 18 :57 WITA.

*<http://aureliusratu.com/2012/07/self-esteem-sebagai-aspek-politik-paul-ricoeur-dalam-the-just/>*didownload, hari/tanggal: Minggu, 17/11/2019. Pukul: 19:10
WITA

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Mario Giovanni Teti

TTL : Atambua, 27 Juni 1997

Email : rioteti89@gmail.com

Riwayat Pendidikan : TK Stelamaris, Atapupu (2002-2003)

: SDK St. Yoseph, Atapupu (2003-2009)

: SMPK Don Bosko, Atambua (2009- 2012)

: SMAK SURIA, Atambua (2012-2015)

: Seminari Tinggi Hati Terkudus Yesus Dan
Hati Tak Bernoda Maria, Kupang (2015-
2017)

: Fakultas Filsafat Universitas Katolik
Widya Mandira, Kupang (2016-2020)